



Pastikan Tak Ada PHK Pegawai

Pj Wali Kota Jogja soal Dampak Efisiensi Anggaran

JOGJA – Pemkot Jogja memastikan pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada pengurangan pegawai di lingkungan Pemkot. Baik tenaga honorer maupun karyawan *outsourcing* yang bekerja sama dengan Pemkot.

Pj Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, kebijakan penghematan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tersebut memang menuntut Pemkot melakukan efisiensi. Namun, meski Pemkot akan berhemat, dia memastikan tidak ada satu pun pegawai maupun karyawan yang akan dirumahkan.

Dia menegaskan, Pemkot saat ini juga sudah tidak menggunakan tenaga harian lepas (THL). Sistem kepegawaian yang berlaku sekarang hanya tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ada pula karyawan *outsourcing* yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.



Anggaran akan berjalan efisien, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak akan sampai terganggu."

SUGENG PURWANTO
Pj Wali Kota Jogja

Untuk gaji PPPK, Sugeng memastikan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi. Demikian pula upah bagi karyawan *outsourcing*. Dia menegaskan, Pemkot sudah memperhitungkan alokasi anggaran untuk gaji karyawan *outsourcing* melalui pembayaran kepada pihak ketiga.

"Jadi, untuk hal-hal yang wajib dan mengikat, memang sudah kami kondisikan," katanya kepada *Jawa Pos Radar Jogja* kemarin (16/2).

Kalaupun ada pengurangan karyawan *outsourcing*, dia memastikan hal tersebut bukan kebijakan Pemkot. Sebab, pengelolaan karya-

wan *outsourcing* sudah menjadi kewenangan pihak ketiga. Artinya, pemutusan hak kerja bisa disebabkan buruknya performa karyawan, bukan terdampak efisiensi.

Sugeng juga memastikan, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program-program prioritas. Misalnya, program yang berkaitan dengan penanganan sampah, bantuan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Dia menjamin program-program tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami pastikan anggaran berjalan efisien, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak akan sampai terganggu," tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat menyatakan mendukung kebijakan Pemkot untuk tetap menjalankan program-program prioritas. Terutama penanganan sampah dan pelayanan kesehatan.

Sebab, politikus Partai Gerindra itu menyatakan, dua masalah tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. "Kami tekankan, dua program tersebut harus tetap berjalan meski ada penghematan. Wajib menjadi prioritas," ujarnya. (*inu/dri*)

posisi aslinya sebagai

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005